



Analisis Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi (PATEN) di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Andi Amalia Ramdani^{1*}, Muktamir Usman², Supris Musafir³

¹⁻²Universitas Puangrimaggalatung, Indonesia

Alamat Kampus: Jl. Puangrimaggalatung, Maddukelleng, Kec. Tempe, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan

Korespondensi penulis: uniprima@gmail.com*

Abstract. *One of the government's steps to achieve quality public services is the implementation of Regional Regulation of Domestic Affairs No. 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated Regional Administration Services (PATEN). The report of the Minister of Home Affairs No. 318/312/PUM dated February 28, 2011, outlines the implementation of Integrated Regional Administration Services (PATEN). PATEN is carried out with the aim of making cities the center of community services and serving as service points for subdistrict offices within the regencies/cities, ensuring that the geographical areas can be served more effectively and efficiently. This study is a qualitative research aimed at providing a general or descriptive overview of the researched topic. To offer a general or descriptive overview, the researcher relies on field data. The findings of this study solely describe or frame in-depth interviews with research subjects to provide a clear understanding of the analysis of the implementation of Integrated Administration Policy in Tempe Subdistrict, Wajo Regency. With the steps that have been taken, it is expected that PATEN in Tempe Subdistrict can operate more effectively, efficiently, and transparently, in line with its objective of delivering optimal services to the community.*

Keywords: *Integrated Administrative Services (PATENT), Implementation of Public Policy, Effectiveness of District Services*

Abstrak. Pelayanan Publik Salah satu langkah pemerintah untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas adalah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelayanan Administrasi Daerah Terpadu (PATEN). Pelayanan Administrasi Daerah Terpadu (PATEN) dilaksanakan dengan tujuan menjadikan kota sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi titik layanan bagi kantor-kantor kecamatan di dalam kota kabupaten/kota sehingga wilayah geografisnya dapat dilayani dengan lebih efektif dan efisien. Sub-area. Merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan untuk memperoleh gambaran umum atau deskriptif mengenai topik yang diteliti. Untuk memberikan gambaran umum atau deskriptif, peneliti mengandalkan data dari bidangnya. Penelitian mendeskripsikan wawancara mendalam terhadap subjek penelitian untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai analisis implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe. Penelitian ini mendeskripsikan atau mbingkai wawancara mendalam terhadap subjek penelitian untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai analisis implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kabupaten Wajo Kecamatan Tempe. Jalan yang telah di tempuh, diharapkan PATEN di Kecamatan Tempe dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan tujuannya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kata Kunci : Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN), Implementasi Kebijakan Publik, Efektivitas Pelayanan Kecamatan

1. LATAR BELAKANG

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dalam arsitektur kebijakan publik, karena memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya. Tujuan implementasi adalah memahami apa yang terjadi setelah kebijakan dinyatakan efektif, sehingga dapat memberikan dampak yang diharapkan. Namun, implementasi kebijakan sering kali menjadi proses politik yang kompleks dan melibatkan berbagai kepentingan, sehingga membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai pihak.

Ketika implementasi kebijakan dilakukan dengan baik, tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tugas negara untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk layanan sosial maupun administratif. Fungsi utama pelayanan publik adalah menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, sehingga mempermudah penyelesaian masalah sosial dan mempercepat pembangunan daerah.

Salah satu langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah melalui penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Umum Daerah (PATEN). Sistem PATEN dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi dari permohonan hingga penerbitan dokumen dalam satu tempat. Hal ini bertujuan menjadikan kota sebagai pusat layanan masyarakat yang efektif dan efisien, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Sistem PATEN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti percepatan proses administrasi dan kejelasan prosedur. Sebelum PATEN diterapkan, masyarakat sering kali harus menunggu lama untuk memproses dokumen. Dengan adanya PATEN, pelayanan menjadi lebih terstandar dan dapat diakses dengan mudah tanpa memerlukan kehadiran langsung kepala wilayah setempat. Namun, dalam praktiknya, penerapan kebijakan ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang muncul dalam penerapan PATEN serta memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan adalah proses transformasi keputusan menjadi tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut teori Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: Komunikasi dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan penerima kebijakan. sumber daya dengan ketersediaan manusia, anggaran, alat, dan kewenangan yang memadai. Disposisi dengan kemauan dan komitmen pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Struktur birokrasi dengan pola organisasi yang mendukung efisiensi implementasi kebijakan.

PATEN (Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu) merupakan suatu layanan yang memberikan pelayanan publik setempat mulai dari tahap permohonan hingga tahap penyiapan

dokumen dalam satu tempat. Ruang lingkup paten adalah layanan perizinan dan layanan tanpa izin.

Pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, dan transparan. PATEN sebagai inovasi pelayanan publik berbasis kecamatan bertujuan mendekatkan akses pelayanan administratif kepada masyarakat dengan standar pelayanan tertentu.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan yaitu faktor Internal adalah Keterbatasan sumber daya manusia dan kejelasan prosedur. Serta faktor Eksternal Pengaruh budaya sosial dan tingkat partisipasi masyarakat.

Implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Tempe dilakukan untuk mewujudkan pelayanan administratif yang efisien. Namun, keberhasilannya dipengaruhi oleh komunikasi efektif, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Hambatan internal dan eksternal harus diatasi untuk memastikan kebijakan memberikan dampak yang optimal. Standar pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya layanan, produk jasa, sarana dan prasarana, kapasitas penyedia layanan public

3. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kantor di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan melakukan reduksi data, penyajian ata, penarikan kesimpulan/verifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

a. Komunikasi

Berdasarkan hasil dari wawancara bahwa implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, dalam proses komunikasi sudah berjalan dengan SOP yang ada dengan penyebaran informasi dan kerja sama dengan beberapa pihak menandakan komunikasi dan informasi terjalin dengan baik. Selain itu respon masyarakat akan kehadiran paten ini sudah dapat membantu kebutuhan masyarakat dalam pengurusan administrasi. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasikan, dan hal tersebut menjadi umpan balik dari informan peneliti. Maka hasil ini, menunjukkan Komunikasi salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan dengan baik. Dari

hasil wawancara dari ke lima informan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yakni komunikasi dapat dikemukakan dari teori Widodo bahwa Komunikasi adalah unsur yang sangat penting karena menyangkut penyampaian informasi, gagasan, teknik, peraturan, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan menggunakan sarana tertentu.

Berkaitan dari hasil penelitian yang telah ditemukan diatas, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan pengabsahan data dengan uji kredibilitas melalui triangulasi, maka dapat dipaparkan Implementasi kebijakan sebagai penunjang Pelayanan terpadu berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan yaitu telah memberikan wewenang kepada setiap staf instansi dan juga telah memberikan informasi terhadap pelayanan terpadu.

Melihat dari hasil rekapitulasi yang peneliti lakukan dapat dilihat dan dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Widodo yaitu komunikasi memiliki unsur yang sangat penting karena menyangkut penyampaian informasi, gagasan, teknik, peraturan, dan lain-lain kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dengan menggunakan sarana tertentu. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasikan, dan hal tersebut menjadi umpan balik dari informan masyarakat dan juga pengurus. Maka hasil ini, menunjukkan Komunikasi salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan dengan baik.

b. Sumber Daya

Hasil wawancara dengan informan senada dengan teori yang disampaikan Widodo,. Memberikan gambaran yang cukup baik dengan Implementasi kebijakan yaitu Sumber Daya. Dalam implementasi kebijakan sumber daya sangat berpengaruh karena sumber daya sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Sumber daya meliputi, Sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan tidak akan terlepas dalam implementasi kebijakan untuk membantu jalannya pelayanan administrasi terpadu PATEN. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasikan, dan hal tersebut menjadi umpan balik dari informan peneliti. Maka hasil ini, menunjukkan Sumber Daya salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan cukup baik.

Dari hasil wawancara dari ke lima informan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yakni komunikasi dapat dikemukakan dari teori Widodo bahwa Sumber daya adalah sangat berpengaruh karena sumber daya sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan.

Berkaitan dari hasil penelitian yang telah ditemukan diatas, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan pengabsahan data dengan uji kredibilitas melalui triangulasi, maka dapat dipaparkan Implementasi kebijakan sebagai penunjang Pelayanan terpadu berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan yaitu keterbatasan staf pegawai dan pembatasan jumlah masyarakat.

Melihat dari hasil rekapitulasi yang peneliti lakukan dapat dilihat dan dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Widodo yaitu sumber daya dalam implementasi kebijakan sumber daya sangat berpengaruh karena sumber daya sebagai kebutuhan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasikan, namun dalam hal pegawai masih kurang maksimal karena kurangnya pegawai dalam mengurus administrasi ketika masyarakat datang. Namun dalam hal pelayanan masyarakat sudah puas atas pelayanannya. Maka hasil ini, menunjukkan sumber daya salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan cukup baik.

c. Disposisi

Hasil wawancara dengan informan senada dengan teori yang disampaikan Widodo,. Memberikan gambaran yang baik dengan Implementasi kebijakan yaitu Disposisi. Disposisi atau kemauan, keinginan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tingkat keberhasilan suatu kebijakan bertumpu pada kemauan para pelaku, dengan adanya kemauan, pelaksanaan implementasi kebijakan PATEN dapat di wujudkan.. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasikan, dan hal tersebut menjadi umpan balik dari informan peneliti. Maka hasil ini, menunjukkan Disposisi salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan cukup baik.

Dari hasil wawancara dari ke lima informan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yakni Disposisi dapat dikemukakan dari teori Widodo bahwa Sumber daya adalah landasan utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tingkat keberhasilan suatu kebijakan bertumpu pada kemauan para pelaku, dengan adanya kemauan, pelaksanaan implementasi kebijakan PATEN dapat di wujudkan.

Berkaitan dari hasil penelitian yang telah ditemukan diatas, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan pengabsahan data dengan uji kredibilitas melalui triangulasi, maka dapat dipaparkan Implementasi kebijakan sebagai penunjang Pelayanan terpadu berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan yaitu bekerja sama dengan instansi terkait, dan juga memberikan pemberitahuan melalui Online *WhatsApp*

Melihat dari hasil rekapitulasi yang peneliti lakukan dapat dilihat dan dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Widodo yaitu landasan utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, tingkat keberhasilan suatu kebijakan bertumpu pada kemauan para pelaku, dengan adanya kemauan, pelaksanaan implementasi kebijakan PATEN dapat di wujudkan. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasi, dan sudah berjalan dengan baik ditambah dengan responden masyarakat. Maka hasil ini, menunjukkan disposisi salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan baik.

d. Struktur Birokrasi

Hasil wawancara dengan informan senada dengan teori yang disampaikan Widodo,. Memberikan gambaran yang baik dengan Implementasi kebijakan yaitu Struktur Birokrasi. Keadaan struktur suatu birokrasi berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi, karena keadaan struktur suatu birokrasi yang baik menghasilkan kebijakan efektif dan efisien. Sehingga pelaksanaan pelayanan implementasi kebijakan dapat tercapai, mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasi, dan hal tersebut menjadi umpan balik dari informan peneliti. Maka hasil ini, menunjukkan Struktur Birokrasi salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan cukup baik.

Dari hasil wawancara dari ke lima informan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu PATEN Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo yakni Struktur Birokrasi dapat dikemukakan dari teori Widodo bahwa Keadaan struktur suatu birokrasi berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi, karena keadaan struktur suatu birokrasi yang baik menghasilkan kebijakan efektif dan efisien.

Berkaitan dari hasil penelitian yang telah ditemukan diatas, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan menggunakan pengabsahan data dengan uji kredibilitas melalui triangulasi, maka dapat dipaparkan Implementasi kebijakan sebagai penunjang Pelayanan terpadu berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan yaitu Pembagian Struktur Yang merata, pengelompokan pegawai yang paten.

Melihat dari hasil rekapitulasi yang peneliti lakukan dapat dilihat dan dibandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Widodo yaitu Keadaan struktur suatu birokrasi berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi, karena keadaan struktur suatu birokrasi yang baik menghasilkan kebijakan efektif dan efisien. Hal ini dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan sudah terealisasi, dan sudah berjalan dengan baik ditambah dengan responden

masyarakat. Maka hasil ini, menunjukkan disposisi salah satu yang dikemukakan oleh Widodo telah diwujudkan baik.

Hambatan yang dialami dalam proses implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu PATEN di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dengan informan diperoleh beberapa hambatan yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1) Proses yang lama

Proses yang lama sering kali digambarkan sebagai proses yang berjalan dengan lambat, tidak efisien, dan memakan waktu yang panjang. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya Kekurangan staf atau petugas yang menangani proses dapat menyebabkan antrian panjang dan waktu tunggu yang lama. Hal ini sering terjadi pada instansi pemerintah atau layanan publik yang ramai dikunjungi.

2) Jaringan atau server

Jaringan atau server yang mengalami error dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti Ketidakmampuan untuk mengakses internet atau layanan online, Kehilangan data, dan gangguan operasional.

Faktor Eksternal

Dalam penelitian skripsi, asumsi tentang tidak adanya hambatan eksternal merupakan hal yang ideal namun jarang ditemui dalam realita

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi kebijakan PATEN secara keseluruhan berjalan lancar meskipun terdapat kendala internal seperti keterbatasan waktu pelayanan dan gangguan jaringan, serta hambatan eksternal seperti perbedaan pemahaman teknologi antargenerasi. Camat dan Sekcam melaporkan tidak adanya keluhan signifikan, meski masyarakat menyarankan perpanjangan waktu pelayanan dan perbaikan infrastruktur teknologi. Rekomendasi mencakup penambahan waktu pelayanan, peningkatan sistem jaringan, pelatihan petugas dan masyarakat, sosialisasi prosedur, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan kualitas layanan. Opsi pelayanan alternatif juga diperlukan agar pelayanan lebih inklusif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan PATEN dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan transparan.

Saran

Untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan implementasi PATEN, berikut saran yang dapat dipertimbangkan:

1. Perpanjangan Waktu Pelayanan: Tambah jam layanan atau kuota harian, khususnya saat jam sibuk.
2. Peningkatan Infrastruktur: Perbaiki jaringan dan sistem server untuk meminimalkan gangguan teknis.
3. Pelatihan dan Sosialisasi: Adakan pelatihan bagi petugas dan masyarakat, serta sosialisasi prosedur untuk meningkatkan pemahaman teknologi, khususnya bagi generasi tua.
4. Evaluasi dan Feedback: Lakukan evaluasi rutin dan kumpulkan umpan balik masyarakat untuk perbaikan layanan.
5. Pelayanan Fleksibel: Sediakan opsi tatap muka atau bantuan khusus bagi yang kesulitan menggunakan teknologi.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Wahab, S. (2004). Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2012). Dasar-dasar kebijakan publik (hlm. 235). Alfabeta.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik. Rineka Cipta.
- Batinggi, A. (1998). Manajemen pelayanan umum. Universitas Terbuka Bentley.
- Edwards III, G. C. (2003). Implementing public policy. Jakarta.
- Hardiansyah. (2010). Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Gava Media.
- Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). Metode penelitian: Pedoman penelitian bisnis dan akademik. LPMP Imperium.
- Joko Widodo. (2010). Analisis kebijakan publik. Bayumedia.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2004 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.
- Lase, (2007). Implementasi pelayanan publik. Program Pasca Sarjana USU.
- Marzuki, I. (2015). Skripsi "Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur di Kab Gresik." Ilmu Pemerintahan: UMM, 15.

- Miles, M. B., & Huberman, M. (1992). Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru. PT Remaja Rosdakarya.
- Moenir, H. A. S. (2002). Manajemen pelayanan umum di Indonesia. PT Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2005). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi, Cetakan ke-21). Remaja Rosda Karya.
- Moleong, L. J. (2013). Metode penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Rosdakarya.
- Nugroho, R. D. (2012). Public policy (Edisi Revisi). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- Rahmayanty, N. (2010). Manajemen pelayanan prima. Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2013). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan. Refika Aditama.
- Sinambela, L. P. (2008). Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasinya. Bumi Aksara.
- Solly. (2007). Kebijakan publik. Mandar Maju.
- Subarsono, A. G. (2005). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2007). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian administrasi. PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cetakan ke-24). Alfabeta.
- Sunggono, B. (2001). Hukum dan kebijaksanaan publik. Sinar Grafika.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/121/PUM Tanggal 3 Februari 2009.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/113/PUM Tanggal 13 Januari 2012.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 318/312/PUM Tanggal 28 Februari 2011.

Winarno, B. (2005). Teori & proses kebijakan publik. Media Pressindo.